

REALISASI

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2011

(Data per Desember 2011)

Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 02B/DPR RI/II/2010-2011 terdapat 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2012 ditambah dengan 21 (dua puluh satu) RUU yang diluncurkan pembahasannya dari Prolegnas Tahun 2010 ke Tahun 2011.

- Dari 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi prioritas tahun 2010, ada 37 (tiga puluh tujuh) yang menjadi RUU prakarsa DPR dan 33 (tiga puluh tiga) RUU yang menjadi prakarsa Pemerintah.
- Dari 21 (dua puluh satu) RUU yang diluncurkan pembahasannya dari Prolegnas Tahun 2010 ke Tahun 2011, terdapat 14 (empat belas) RUU prakarsa DPR dan 7 (tujuh) RUU prakarsa Pemerintah.

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi I DPR)
2	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi II (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Aparatur Sipil Negara)
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi III DPR)
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi III DPR)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
	Korupsi			
5	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi IV
6	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi IV
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi IV
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
10	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VII DPR)
12	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
13	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
15	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
17	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
18	RUU tentang Tenaga Kesehatan	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM) (Awalnya sebagai prakarsa Komisi IX, tetapi kemudian dialihkan dialihkan menjadi prakarsa Pemerintah)
19	RUU tentang Keperawatan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
20	RUU tentang Kebudayaan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
21	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
22	RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi X (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Pendidikan Tinggi)
23	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi X
24	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Pansus

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
27	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Pansus (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Organisasi Masyarakat)
30	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
31	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
32	RUU tentang Daerah Perbatasan	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
33	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Pansus
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
35	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
36	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
38	RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	PEMERINTAH	Telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	(Catt: Disetujui Rapat paripurna DPR tanggal 16 Desember 2011)
39	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
40	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi II
41	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
42	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
43	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
44	RUU tentang Desa	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
45	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan HAM)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
46	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan HAM)
47	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan HAM)
48	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	PEMERINTAH		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi III (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
49	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan HAM)
50	RUU tentang Perampasan Aset	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
51	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan HAM)
52	RUU tentang Hak Kekayaan Industri	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan HAM)
53	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMERAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
54	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
55	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
56	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	PEMERINTAH		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi XI
57	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
58	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
59	RUU tentang Konvergensi Telematika	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
60	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
61	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
62	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi kemudian dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian PAN dan RB dan dilanjutkan di Setwapres)
63	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
64	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Kementerian Perhubungan)
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
66	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Pertahanan)
67	RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional	DPR		Internal Pemrakarsa (Awalnya sebagai prakarsa Pemerintah, tetapi kemudian dialihkan dialihkan menjadi prakarsa DPR) (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan)
68	RUU tentang Keamanan Nasional	PEMERINTAH		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi I
69	RUU tentang Keantariksaan	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM)
70	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	PEMERINTAH		Internal Pemrakarsa (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA
DARI PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2010 KE TAHUN 2011**

NO.	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
1	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU no. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	
4	RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
5	RUU tentang Mata Uang	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	
6	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
7	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
8	RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	

NO.	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	
10	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi VI
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	
13	RUU tentang Intelijen	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara	
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	
15	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	Pemerintah		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi I
16	RUU tentang Keimigrasian	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	
17	RUU tentang Transfer Dana	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	Pemerintah		RUU dalam tahap pembicaraan Tk. I di Komisi VI
19	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	
20	RUU tentang Akuntan Publik	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	

NO.	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	REALISASI	KETERANGAN
21	RUU tentang Informasi Geospasial	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA		
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) UU No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) (catt: Disetujui Rapat paripurna DPR tanggal 6 Desember 2011)
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. UU No. 14 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 UU No. 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	